

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan .

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang. Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan

Secara umum strategi dipetakan kedalam empat perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

1. **Perspektif Masyarakat/Layanan:** bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi
2. **Perspektif Proses Internal:** strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.
3. **Perspektif Kelembagaan :** strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.

4. **Perspektif Keuangan** : strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan dengan mencermati isu strategis pembangunan NTB 5 tahun kedepan, maka strategi, arah Kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Penjabaran dari Misi dan Tujuan

VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera					
MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
Pertama: Mempercepat Perwujudan Masyarakat Yang Berkarakter	1.1	Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti	Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam	Fasilitasi, edukasi dan revitalisasi sarana dan prasarana Islamic Center	Pembangunan sarana prasarana ibadah, aktivitas keagamaan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat
			Berkembangnya kegiatan rumah ibadah	Fasilitasi, mobilisasi, Edukasi dan revitalisasi kegiatan rumah ibadah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kegiatan ibadah • Pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi umat
			Terwujudnya masyarakat yang tertib	Sosialisasi , mobilisasi dan edukasi masyarakat	Pemasyarakatan budaya tertib
			Terwujudnya masyarakat yang taat beragama	Edukasi dan mediasi masyarakat	Pengembangan dan Peningkatan kualitas lembaga-lembaga keagamaan
			Tersedianya pemuka agama yang berkualitas	Edukasi pemuka agama	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan metode dakwah dan ceramah • Pengembangan

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
					wawasan Pembangunan daerah
	1.2	Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai	Edukasi , mediasi dan Fasilitasi siaran/informasi	Lembaga penyiaran
			Tercegah berkembangnya paham radikal	Sosialisasi, koordinasi dan deradikalisasi kepada masyarakat	Masyarakat rawan konflik
			Terwujudnya ketahanan ipoleksosbudhankam	Sosialisasi, koordinasi, fasilitas dan edukasi kepada masyarakat	Nilai-nilai keagamaan
			Terwujudnya kurikulum pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah	Koordinasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	Ideologi nasional dan budaya daerah
Kedua: Mengembangkan Budaya Dan Kearifan Lokal	2.1	Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas	Koordinasi , revitalisasi dan fasilitasi pranata-pranata adat	Awig-awig dan seluruh aspek kehidupan masyarakat
			Terwujudnya masyarakat/ budayawan/ seniman yang kreatif dan inovatif	Fasilitasi, edukasi dan promosi masyarakat/ budayawan/ seniman	Nilai-nilai Budaya Lokal
			Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif	Koordinasi , revitalisasi dan fasilitasi pusat kebudayaan daerah	Museum, Taman Budaya maupun lokasi peninggalan budaya lainnya

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
			Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional	Koordinasi , revitalisasi dan fasilitasi sanggar seni dan budaya	Penciptaan kreasi seni dan budaya
			Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal	Fasilitasi, mobilisasi dan demontrasi adat budaya dan kearifan lokal	Ragam adat istiadat dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari
	2.2	Meningkatkan sinergitas pelestarian lingkungan budaya, pemuliaan budaya dan kearifan lokal	Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal	Koordinasi dan inventarisasi informasi	Khasanah budaya
			Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya	Rehabilitasi dan renovasi situs-situs dan peninggalan budaya lainnya	Pada wilayah obyek-obyek wisata budaya
			Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal	Koordinasi, edukasi, fasilitasi dan regulasi bahasa dan sastra lokal	Kajian, pengembangan dan pemanfaatan Bahasa Sasak, Samawa dan Mbojo
			Terlindungnya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal	Koordinasi, fasilitasi dan regulasi kekayaan seni budaya dan kearifan lokal	Karya seni budaya dan nilai kearifan lokal
			Tersedia, terpelihara dan ter-sebarnya koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam	Inventarisasi, dokumentasi dan publikasi koleksi daerah	Naskah kuno/klasik dan koleksi deposit daerah NTB
Ketiga: Melanjutkan Ikhtiar Reformasi Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Dan Memantapkan	3.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai	Koordinasi, konsultasi, regulasi dan fasilitasi SPM dan SOP	SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
			Terwujudnya aparatur yang profesional	Sosialisasi, edukasi dan fasilitasi aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi pelayan publik

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
Stabilitas Keamanan					<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan RAD PPK
			Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai	Renovasi, revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana pelayanan publik	Peningkatan kualitas sarana prasarana termasuk layanan informasi
			Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah	Sosialisasi, inventarisasi, fasilitasi dan duplikasi dokumen/ arsip daerah	Naskah khasanah NTB
			Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Fasilitasi, sosialisasi dan publikasi data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi	pengembangan e-government
3.2	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya aturan hukum yang efektif	Koordinasi perkuatan aturan hukum	Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	
		Terfasilitasinya aparat hukum yang profesional	Edukasi aparat hukum	Aparat penegak hukum Peraturan Daerah/Perundangan lainnya	
		Terfasilitasinya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai	Konsultasi, koordinasi dan revitalisasi sarana prasarana penegakan hukum	Sistem komunikasi terpadu antar aparat penegak hukum	
		Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum	Sosialisasi, koordinasi edukasi dan rehabilitasi aparatur dan masyarakat	Penyadaran perbuatan melanggar hukum	

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
				Inventarisasi dan fasilitasi aparatur serta masyarakat	Pencegahan dan penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik
			Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkoba	Koordinasi dan mobilisasi pencegahan dan penanganan penyebaran dan penggunaan narkoba	Kalangan generasi muda, aparatur dan masyarakat
	3.3	Meningkatkan profesionalitas dunia usaha	Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel	Koordinasi, promosi, sosialisasi, edukasi dan fasilitasi lembaga usaha	koperasi, UMKM dan Badan Usaha Milik Daerah
			Tersedianya pelaku usaha yang professional	Edukasi, fasilitasi dan sosialisasi pelaku usaha	kualitas pengelolaan usaha
	3.4	Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah	Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan sosialisasi rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah	Proses perencanaan dan proses monitoring evaluasi program/kegiatan utama dan program/kegiatan terobosan serta kegiatan pendataan/informasi pembangunan daerah
	3.4	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik	Edukasi, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi tata kelola keuangan daerah dan BMD	Administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah
	3.5	Meningkatkan kualitas pengawasan aparatur	Terwujudnya pengawasan yang professional	Edukasi dan fasilitasi pengawasan	Peningkatan kualitas SDM auditor

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
	3.6	Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggung jawab	Edukasi , matrikulasi dan fasilitasi perwujudan suasana politik yang santun dan bertanggung jawab	Pendidikan kesadaran politik masyarakat
			Tertatanya otonomi daerah	Sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi otonomi daerah	Penyelenggaraan pemerintahan daerah
			Terwujudnya organisasi masyarakat dan organisasi politik yang aspiratif	Matrikulasi, mobilisasi dan fasilitasi organisasi masyarakat dan organisasi politik	Kepekaan terhadap masalah sosial politik
	3.7	Meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah-masalah hukum	Terwujudnya masyarakat yang taat hukum	Sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kamtibmas dan tertib hukum
			Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional	Edukasi aparat penegak hukum	Pendidikan mental dan spiritual
			Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan)	Edukasi dan promosi aparat penegak hukum	Rekrutmen Satpol PP, PPNS dan Jagawana/PolHut
Keempat: Meningkatkan Mutu Sumberdaya Manusia Yang Berdayasaing	4.1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender	Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan	Sinergi kegiatan pembangunan sosial
			Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil, dan	Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi layanan	Standart pelayanan sosial dasar

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
			terjangkau	sosial dasar	
			Terwujudnya Generasi Emas 2025	Koordinasi, sinkronisasi edukasi, fasilitasi dan mobilisasi GENERASI EMAS 2025	Pendidikan pra nikah, Kesehatan anak dan ibu melahirkan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, gizi buruk, sanitasi, air bersih layak minum, penderita gangguan jiwa, penyandang cacat, pendidikan universal, PAUD, pendidikan non formal, keaksaraan usaha mandiri dan keluarga berencana
			Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten	Edukasi tenaga pelayanan sosial dasar	Tenaga medis, tenaga pendidik dan pekerja sosial
			Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai	Revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana layanan sosial dasar	Sarana Prasarana: pendidikan dan kesehatan termasuk RSU Provinsi dan UPT sosial dan tenaga kerja
			Terwujudnya perempuan yang profesional	Sosialisasi dan edukasi perempuan di perdesaan	PHBS
			Terwujudnya prestasi olahraga	Fasilitasi dan edukasi pembentukan atlet berprestasi	Cabang olah raga unggulan
			Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpencil	Fasilitasi dan revitalisasi layanan sosial	Layanan kesehatan, pendidikan, latihan kerja dan kesempatan kerja
4.2	Meningkatkan sinergitas tenaga	Tersedianya sarana prasarana pendidikan	Revitalisasi sarana prasarana	BLK, KLK dan lembaga pendidikan keterampilan	

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
		kerja dengan lapangan kerja	dan latihan tenaga kerja yang memadai	pendidikan dan latihan tenaga kerja	usaha lainnya
			Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional	Koordinasi dan mobilisasi Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	Kualitas pelayanan
			Tersedianya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha	Koordinasi dan negosiasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama	Jenis usaha pariwisata dan agroindustri
			Terdistribusinya penduduk ke daerah transmigrasi	Inventarisasi, identifikasi, fasilitasi dan relokasi penduduk	Transmigrasi luar daerah
Kelima: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan Kemiskinan, Dan Mengembangkan Keunggulan Daerah	5.1	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam	Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan	Sinergi kegiatan pembangunan ekonomi
			Tersedianya data dan informasi potensi SDA	Identifikasi dan inventarisasi data informasi	Database potensi SDA
			Termanfaatkannya Teknologi Tepat Guna	Mobilisasi dan fasilitasi Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan TTG oleh masyarakat
			Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan	Inventarisasi, sosialisasi, fasilitasi, dan reklamasi SDA	Pengendalian dampak pemanfaatan SDA khususnya daerah pertambangan
			Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata	Fasilitasi, koordiiinasi, rehabilitasi dan regulasi pengembangan destinasi wisata	Obyek wisata unggulan
			Terwujudnya promosi/pemasaran obyek pariwisata	Koordinasi, fasilitasi dan promosi/	Pasar wisata dunia

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
				pemasaran obyek wisata	
	5.2	Meningkatkan kapasitas, produktivitas, kualitas masyarakat petani, masyarakat nelayan dan masyarakat sekitar kawasan hutan	Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai	Revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana produksi	Peralatan industri kecil menengah
			Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar	Intensifikasi produk SDA berkualitas	Tanaman padi dan palawija
				Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas	Lahan kering dan sawah
				Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi tanaman dan hasil ikutannya	Padi, jagung, kentang, kedelai, kopi, kakao dan jambu mete
				Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	Komoditi gaharu, ketak, kemiri, madu dan rotan
				Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk budidaya perikanan dan kelautan	Komoditas ekspor rumput laut, udang dan kerapu
				Ekstensifikasi dan intensifikasi ternak	Komoditi sapi
				Ekstensifikasi pemasaran produk SDA berkualitas	Komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil hutan bukan kayu

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
				Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas	Hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu
				Fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif	Kerajinan industri dan makanan olahan
				Fasilitasi kelompok masyarakat	Pendampingan petani, peternak, nelayan dan masyarakat pesisir serta masyarakat sekitar kawasan hutan
			Terwujudnya tenaga kerja terampil	Edukasi dan fasilitasi tenaga kerja terampil	Pengembangan ekonomi kreatif
			Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah	Investasi dan fasilitasi modal usaha / kerja	UMKM dan IKM
				Divestasi dan fasilitasi dana penyertaan modal	BUMD dan swasta
	5.3	Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi	Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat	Identifikasi , inventarisasi dan publikasi data dan informasi	Database investasi
			Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Promosi layanan investasi	PTSP ONLINE
			Terwujudnya ekspor daerah	Fasilitasi dan regulasi ekspor daerah	Komuditi unggulan daerah
	5.4	Meningkatkan sumber pendanaan daerah	Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat	Identifikasi dan evaluasi data dan informasi	Database sumber-sumber PAD
			Tersedianya sistem pelayanan PAD	Sosialisasi dan fasilitasi sistem pelayanan PAD	Sistem pelayanan Online

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
			Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya	Identifikasi, fasilitasi dan negosiasi dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya	Database dana non pemerintah daerah
	5.5	Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah	Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai	Revitalisasi sarana prasarana perekonomian	Sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran
			Tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah	Koordinasi dan sinkronisasi dokumen penunjang kerjasama ekonomi	Penyiapan bahan baku, olahan dan pemasaran
Keenam: Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah Berbasis Tata Ruang	6.1	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota, antar wilayah	Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan	Sinergi kegiatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
			Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/ proporsional	Koordinasi, konsultasi, revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana wilayah	Sistem perhubungan udara, sistem perhubungan darat, sistem perhubungan laut, sumber air baku dan air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan/limbah
			Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai	Koordinasi, regulasi, konstruksi dan fasilitasi sistem jaringan transportasi	Sistem jaringan lokal, nasional dan internasional

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
	6.2	Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah	Terwujudnya rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Koordinasi, regulasi, implementasi dan evaluasi rencana pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	Kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota
			Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang	Sosialisasi, regulasi dan fasilitasi masyarakat	Aparat pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
			Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman, nyaman dan produktif	Sosialisasi dan revitalisasi lingkungan permukiman	Rumah tidak layak huni dan kampung kumuh
Ketujuh: Memantapkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	7.1	Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH	Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan	Sinergi kegiatan pembangunan lingkungan hidup
			Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan	Sosialisasi, regulasi dan fasilitasi masyarakat	Masyarakat perkotaan
			Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup	Sosialisasi, edukasi dan regulasi masyarakat	Masyarakat kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan rawan bencana pesisir laut dan pulau-pulau kecil
			Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)	Identifikasi dan inventarisasi data informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)	Dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup

**VISI : Mewujudkan Masyarakat NTB yang Beriman, Berbudaya,
Berdayasaing dan Sejahtera**

MISI	TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN 2014
			Terwujudnya sumber daya alam yang lestari	Sosialisasi , rehabilitasi , reboisasi, regulasi dan konservasi sumberdaya alam	Kawasan Geopark, Kawasan hutan, kawasan bantaran sungai, kawasan rawan bencana, kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, KSP fungsi lindung dan konservasi serta berbagai sumber daya hayati, keanekaragaman hayati dan plasma nutfah
	7.2	Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana	Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana	Identifikasi dan inventarisasi data dan informasi	Database daerah rawan bencana dan perubahan iklim
			Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana	Revitalisasi sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana	Early Warning System, Pusedalops
			Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana	Sosialisasi , edukasi dan simulasi masyarakat	Masyarakat disekitar kawasan rawan bencana, dan organisasi kemasyarakatan
			Terwujudnya kawasan tangguh bencana	Identifikasi, sosialisasi, fasilitasi dan mobilisasi kawasan tangguh bencana	Kawasan rawan bencana